

GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP) KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2024

KOLOM 1	KOLOM 2	KOLOM 3	KOLOM 4	KOLOM 5	KOLOM 6	KOLOM 7	KOLOM 8	KOLOM 9
Kebijakan / Program / Kegiatan / Tujuan	Data Pembuka Wawasan (Data Pilah Gender)	Isu Gender			Kebijakan Dan Rencana Aksi		Pengukuran Hasil	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Tolok Ukur Kinerja/Data Dasar Base Line	Target Kinerja/Indikator Gender
Program :								
Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Jumlah penduduk Kota Payakumbuh pada tahun 2021 berjumlah : 141.184, laki-laki 71.084 (50.34%) dan perempuan 70.100 (49.66%). Meskipun jumlah laki-laki tahun 2020 lebih banyak daripada perempuan, namun permasalahan pembangunan dialami kaum perempuan merupakan isu yang tetap perlu dianalisis. Pelaksanaan Musrenbang yang bertujuan merumuskan Rancangan Akhir RKPD Tahun 2024. Pada tahun 2023 musrenbang RKPD dilaksanakan secara tatap muka dan secara virtual dihadiri lebih banyak oleh Laki-laki (57,93%) dan perempuan dan anak hanya 342,07%, dari jumlah kehadiran Musrenbang Kota. Peserta yang diundang pada acara Musrenbang terdiri dari Perangkat Daerah se-Kota Payakumbuh, DPRD Kota Payakumbuh, Lurah, Fasilitator kelurahan, Delegasi dari Kecamatan, Lembaga Non Pemerintah; Perguruan Tinggi, LSM terkait, Asosiasi Profesi, Perbankan dan BUMN di Kota Payakumbuh; Keterwakilan Perempuan dan kelompok termajinalkan lainnya. Dari daftar undangan yang ada keterlibatan laki-laki berkisar 58% dan sisanya perempuan. Dengan pemateri atau narasumber yang juga didominasi kaum laki-laki dengan proporsi 87,50%. Banyak usulan yang dihasilkan dalam proses di kelurahan lebih banyak sifatnya pembangunan infrastruktur fisik	Dengan keterlibatan mayoritas laki laki pada musrenbang tersebut maka menimbulkan beberapa permasalahan kesenjangan sebagai berikut : a) Aspek akses : tidak ada masalah b) Aspek Kontrol : peserta didominasi oleh laki-laki; masih rendahnya pengetahuan tentang isu gender dikalangan aparat pemerintah maupun masyarakat; masih rendahnya kepedulian aparat pemerintah maupun masyarakat tentang isu gender. c) Aspek Manfaat : rendahnya pemahaman tentang isu gender; meskipun sudah memiliki pengetahuan tentang isu gender, namun komitmen Kepala Perangkat Daerah untuk mengimplementasikan isu gender pada pelaksanaan	1. Bappeda belum membuat regulasi yang mengatur representasi perempuan dan laki-laki pada Musrenbang 2. Sedikitnya jumlah kuota peserta Musrenbang dari unsur keterwakilan perempuan dalam Musrenbang	1. Adanya budaya patriarki yang masih mengutamakan kaum pria dalam hal-hal publik seperti menjadi kepala keluarga, kepala desa, ketua kelompok, tokoh masyarakat dan lain sebagainya; 2. Masih terbatasnya pemahaman masyarakat tentang gender, yang mengartikan gender adalah mendahulukan perempuan; 3. Masih rendahnya pengetahuan pejabat Perangkat Daerah terkait isu gender. 4. Terbatasnya jumlah peserta yang diundang dalam	Terumuskannya RKPD Tahun 2024 yang responsive gender	1. Melakukan klasifikasi antara laki-laki dan perempuan pada daftar hadir musrenbang 2. Menambahkan materi tentang penjelasan masalah gender di sesi pemaparan pada Musrenbang Kota 3. Menambah kuota peserta bagi unsur keterwakilan perempuan menjadi minimal 3 orang peserta	Pelaksanaan musrenbang yg bertujuan merumuskan Rancangan RKPDP mayoritas dihadiri oleh Laki-laki (58%) dan perempuan 42%, dari jumlah kehadiran Musrenbang Kota. Semua Perangkat Daerah melampirkan dokumen GAP & GBS pada lampiran rencana kerja dan dan anggaran	Input: 1. Peserta musrenbang utusan kecamatan, OPD dan Organisasi Kemasyarakatan dengan memperhatikan responsif gender

KOLOM 1	KOLOM 2	KOLOM 3	KOLOM 4	KOLOM 5	KOLOM 6	KOLOM 7	KOLOM 8	KOLOM 9
Kebijakan / Program / Kegiatan / Tujuan	Data Pembuka Wawasan (Data Pilah Gender)	Isu Gender			Kebijakan Dan Rencana Aksi		Pengukuran Hasil	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Tolok Ukur Kinerja/Data Dasar Base Line	Target Kinerja/Indikator Gender
Kegiatan: Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	dan prasarana serta sangat minim mengusulkan usulan yang menjadi kebutuhan mayoritas penduduk yang adalah perempuan. Selain itu keterbatasan peserta yang diundang pada musrenbang kelurahan juga menjadi pemicu ketidakterlibatan kaum perempuan dalam mengikuti musrenbang. Mulai Tahun 2019 dokumen GAP GBS sudah menjadi bagian dokumen Rencana Kerja perangkat daerah	program/kegiatannya masih rendah. d) Aspek Partisipasi : Keterlibatan perempuan sangat terbatas dalam kegiatan Musrenbang yang bisa mengatasi permasalahan dan kebutuhan perempuan dan laki-laki;		musrenbang dikelurahan 5. Belum optimalnya Focal Point Gender seluruh Perangkat Daerah di Pemerintahan Kota Payakumbuh		Kegiatan:Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah yang responsif Gender	output: Meningkatnya Jumlah kehadiran perempuan, anak dan kaum termarjinalkan dalam musrenbang; ; Meningkat usulan yang diterima di tingkat kecamatan	output: Jumlah kehadiran perempuan, anak dan kaum termarjinalkan dalam musrenbang; Persentase usulan yang diterima di tingkat kecamatan
Tujuan : Terumuskannya Rancangan Akhir RKPD tahun 2024							outcomes: Meningkatnya kehadiran perempuan, anak dan kaum termarjinalkan dan berpartisipasi dalam perencanaan pembangunan	outcomes: Persentase kehadiran perempuan, anak dan kaum termarjinalkan dalam musrenbang; persentase pagu belanja dalam RKPD yang mengakomodir usulan masyarakat

KOLOM 1	KOLOM 2	KOLOM 3	KOLOM 4	KOLOM 5	KOLOM 6	KOLOM 7	KOLOM 8	KOLOM 9
Kebijakan / Program / Kegiatan / Tujuan	Data Pembuka Wawasan (<i>Data Pilah Gender</i>)	Isu Gender			Kebijakan Dan Rencana Aksi		Pengukuran Hasil	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Tolok Ukur Kinerja/Data Dasar Base Line	Target Kinerja/Indikator Gender



YASRIZAL, S.Sos, M.Si
 NIP.19680307 199009 1 001